BAB I

PENDAHULUAAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam perkembangan paradigma pembangunan modern, pembangunan tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan pada aspek pemerataan kesejahteraan, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Pendekatan pembangunan yang partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholisah dan Ramdani (2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan di tingkat lokal karena masyarakat berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, paradigma pembangunan mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak diterapkannya sistem desentralisasi pemerintahan. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk mengelola potensi wilayahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Perubahan paradigma

pembangunan tersebut juga berdampak pada pembangunan di tingkat desa, di mana desa tidak lagi hanya dipandang sebagai objek pembangunan yang menerima kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul serta prakarsa masyarakat desa.

Melalui kebijakan tersebut, desa diberikan peran yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya masing-masing (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, mengelola anggaran pembangunan desa, serta melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014). Pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan). Namun demikian, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan (Hanif Nurcholis, 2021: 73).

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembangunan desa adalah melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki sehingga masyarakat mampu berperan aktif dalam proses pembangunan. Melalui pemberdayaan masyarakat, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari program pembangunan, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Mita Sari dan Budi Ghazali (2024) menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengambil keputusan serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) serta tanggung jawab masyarakat terhadap keberhasilan program pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh dan Khotimah (2025) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan pembangunan desa karena masyarakat turut berkontribusi secara langsung dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Dalam praktik pembangunan desa, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, serta evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Supardal (2024) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat menyebabkan program pembangunan tidak berjalan secara optimal karena masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap program pembangunan yang dilaksanakan.

Meskipun partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa, dalam praktiknya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan desa seringkali belum berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap pelaksanaan kegiatan saja, sementara pada tahap perencanaan maupun evaluasi program masyarakat belum sepenuhnya terlibat secara aktif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Puspita Dewi (2024) menunjukkan bahwa dalam beberapa forum perencanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat masih cenderung didominasi oleh kelompok tertentu sehingga aspirasi masyarakat secara luas belum sepenuhnya terakomodasi.

Desa Mojorejo yang terletak di Kecamatan Junrejo, Kota Batu merupakan salah satu desa yang melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program-program tersebut meliputi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, serta berbagai kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat desa. Program pemberdayaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa di Desa Mojorejo masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal pada setiap tahapan kegiatan. Pada tahap perencanaan, misalnya melalui forum musyawarah desa, tidak seluruh masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menyampaikan aspirasi maupun pandangannya terkait program pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain itu, dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa, partisipasi masyarakat masih cenderung didominasi oleh kelompok tertentu sehingga belum mencerminkan keterlibatan yang merata dari seluruh elemen masyarakat. Kondisi yang sama juga terlihat pada tahap evaluasi program, di mana sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap pasif dan belum sepenuhnya terlibat dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program pemberdayaan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Agar masalah tidak melebar dan pembatasan menjadi jelas maka pada penelitian ini harus dirumuskan permasalahannya. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitiaan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Di Desa Mojorejo,Kecamatan Junrejo, Kota Batu?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo,Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka jelaslah tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

2. Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Desa Di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya dan mengkontekstualisasikan teori pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka desentralisasi pasca-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara spesifik, penelitian ini berkontribusi dengan menyediakan bukti empiris mengenai korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat dengan keberlanjutan program pemberdayaan (*people-centered development*), sehingga dapat memperkuat atau merevisi konsep bahwa partisipasi aktif (meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi) merupakan indikator kunci keberhasilan yang menumbuhkan rasa kepemilikan *(sense of belonging*) dan tanggung jawab (*sense of responsibility*) di tingkat akar rumput, yang mana temuan ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan (gap) antara idealita regulasi dan realita implementasi di lapangan.

b. Manfaat akademis

Penelitian ini merupakan merupakan salah satu syarat penting bagi mahasiswa (S1) untuk menyelesaikan studi dan penelitian ini merupakan upaya nyata yang berguna dalam membandingkan prakter serta kondisi yang ada. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan dalam memperkaya pemberdaharaan kepustakaan bidang Ilmu Administrasi Publik

c. Manfaat praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Mojorejo Memberikan umpan balik (f*eedback*) yang objektif mengenai sejauh mana keterlibatan masyarakat telah optimal dalam program pemberdayaan. Hasil identifikasi faktor penghambat dan pendorong dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perumusan strategi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi di masa depan, sehingga program dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
2. Bagi Pemerintah Daerah (Kecamatan Junrejo dan Kota Batu) Dapat menjadi masukan *(input*) dalam merancang model dan mekanisme fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan inklusif bagi seluruh desa di wilayahnya. Membantu dalam memastikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya pembangunan dengan mempertimbangkan faktor partisipasi masyarakat.
3. Bagi Masyarakat Desa Mojorejo Meningkatkan kesadaran (*awareness*) kolektif mengenai pentingnya peran aktif mereka dalam setiap tahapan pembangunan desa, sehingga rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap hasil pembangunan semakin kuat.